KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

		FINAL/HDAK FINAL			5.		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 7 9 6			H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 4 8 3 8 5 4 4 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : HARDIANTO							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
5	21-402-01	9.855.000	9.855.000	0	5	492.750	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04822/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi :							
C.4 Tanggal :		1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan : RIANDY							
: Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	. mengatur bahwa do	kumen ini tel	ah ditandatangani secara	

Z3036G1E